

## **Pemprov Sulut Dukungan Penuh Makan Bergizi Gratis, 10 Miliar di APBD 2025 untuk Topang Program Nasional, Menunggu Juknis Pusat**



*<https://manadopost.id>*

MANADOPOST.ID- Di tahun 2025, program makan bergizi gratis (MBG) juga bakal bakal menasar para anak di bumi nyiur melambai. Bahkan pelaksanaannya sudah diagendakan dan masuk dalam APBD Pemprov Sulawesi Utara tahun 2025 ini.

Tak tanggung-tanggung, total Rp10 miliar telah dialokasikan dalam APBD Pemprov Sulut tahun ini, untuk mendukung program nasional tersebut. Hal ini jadi komitmen Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw bersama jajarannya.

Halnya disampaikan Gubernur Olly Dondokambey. Menurutnya dukungan penuh sudah disiapkan oleh Pemprov. "Pemprov sudah siapkan 10 miliar di APBD. Tapi kan makan bergizi gratis untuk anak SD, itu kan wilayah kabupaten/kota, namun kami menyiapkan dan mendukung untuk program itu," katanya belum lama ini.

Untuk pelaksanaannya program nasional ini nanti, lanjut Gubernur dua periode ini, tinggal menunggu petunjuk teknis (Juknis). "Untuk makan bergizi gratis kita sudah siapkan didalam APBD 2025. Kita sudah siapkan dananya. Tinggal kan juknis bagaimana," tegasnya.

Hal yang sama disampaikan Sekprov Steve Kepel. "Untuk program makan bergizi gratis ini, sudah diagendakan dan masuk dalam APBD tahun 2025. Tinggal teknis pelaksanaannya akan kita bahas dan bicarakan," ungkapnya.

Dirinya menambahkan bahwa program ini ditujukan untuk siswa sekolah dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 15 Kabupaten/kota. "Karena ini kan ditujukan untuk anak SD dan Paud. Supaya makanan bergizi gratis ini dapat mengurangi stunting dan gizi buruk bagi anak-anak SD maupun Paud," katanya menambahkan untuk teknis pelaksanaan yang pasti kita kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pun untuk jumlah alokasi anggaran yang ditetapkan di APBD, tegas Kepel memastikan akan mencukupi di sepanjang tahun 2025 ini. "Alokasi anggaran ada. Kami alokasikan paling tidak ini cukup untuk 1 tahun anggaran," tegasnya lagi.

Diketahui sebelumnya, program makan bergizi gratis gencar dilaksanakan di awal tahun 2025 ini. Bahkan telah berlangsung dengan beberapa titik di bumi nyiur melambai. Maka komitmen mendukung program pemerintah pusat ini, juga diikrarkan Pemprov Sulut. Salah satunya lewat penyediaan logistik pangan. Tak hanya itu, dari segi ketersediaan ikan berkualitas baik juga disiapkan.(rez).

**Sumber:**

1. <https://www.rri.co.id/manado/makan-bergizi-gratis/1256863/pemprov-sulut-dukung-program-makan-bergizi-gratis>, Manado, 15 Januari 2025.
2. <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/285583646/pemprov-sulut-dukungan-penuh-makan-bergizi-gratis-10-miliar-di-apbd-2025-untuk-topang-program-nasional-menunggu-juknis-pusat>, Manado, 29 Januari 2025.

**Catatan:**

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Perpres Percepatan Penurunan Stunting) mengamanatkan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penyediaan asupan gizi bagi anak-anak, guna menekan angka stunting.

Berdasarkan Perpres Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk :

- a. menurunkan prevalensi Stunting;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses penuh dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Selanjutnya pada Pasal 3 Pepres tersebut diatur bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan dengan kelompok sasaran meliputi :

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh Sembilan) bulan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa penggunaan anggaran daerah harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas. Pelaksanaan program ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, yang menjadi dasar bagi mekanisme penyaluran dan distribusi makanan bergizi kepada anak-anak di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.